

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Solo: *Pustaka Iltizam*.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Sari, D. (2025). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Penerbit NEM.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudantra, I Ketut. (2016). *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sukadana, I Ketut. (2017). *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Suwitra, I Made. (2014). *Hukum Adat Bali dan Permasalahannya*. Denpasar: Udayana University Press.
- Windia, Wayan P., dan I Ketut Sudantra. (2016). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Artikel dalam Jurnal

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal ilmu sosial dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Pengembangan Usaha terhadap Perempuan Bali Pascaperceraian dari Perkawinan Campuran Bermuatan Gender dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(1), 104-112.
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 26-43.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Artatik, I. G. A. K., Saputra, I. G. N. A., & Apsaridewi, K. I. (2020). Implikasi Yuridis

Konversi Agama terhadap Kedudukan ahli Waris. Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 3(1), 45-62.

Fiqri, Y. Y. (2023). Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam. Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 3(II).

Munir, M. (2021). Ragam budaya indonesia sebagai strategi dalam membangun literasi dan sdm masyarakat. *Ambarsa: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 43-54.

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(02)

Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*, 36(3), 325-334.

Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Syaikhu, H. M. H. I. (2022). Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal). Penerbit K-Media.

Warsita, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83-87.

Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 80-85.

Karya Tulis Ilmiah

Agus Yudha Artama, 1 Putu (2022) Eks/Stensi Pelaksanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Dalam Persepektif Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salam Undergraduate Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

Sarah, H. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen I, II, III, dan IV).

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan LN No. 3019. Jakarta. Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta: Sekretariat Negara.

Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Peraturan Desa Adat

Desa Adat Abang Batudinding. (2000). *Pararem Desa Adat Abang Batudinding Tahun 2000*. Kintamani: Desa Adat Abang Batudinding

